

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan di antaranya :

- a. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan dana desa sudah terrealisasi dengan baik atau efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada segi pembangunan desa, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebanyak 48 % dan sudah terrealisasi pada tahun anggaran 2019, namun disisi lain belum memberikan dampak bagi kebutuhan masyarakat desa yang membuat kurang efektifnya pengelolaan anggaran dana desa pada bidang pembangunan. Sementara pada bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa hanya prioritaskan pada aspek pembinaan dan penguatan kelembagaan tanpa memperhatikan kesehatan, pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat desa. Bidang belum berjalan secara efektif, dimana BumDes yang seharusnya menjadi elemen penting dalam penguatan produktifitas ekonomi masyarakat desa belum diefektifkan melalui anggaran desa Pilolahunga
- b. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan dana desa di desa Pilolahunga, diantaranya faktor Sumber Daya Manusia, dengan tingkat pendidikan rata-rata SMA sederajat mempengaruhi kompetensi

- c. kinerja aparatur dalam penguasaan IT dan kinerja lainnya. Selain itu faktor yang berikutnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. kebutuhan dasar dan tuntutan yang belum diakomodir lewat alokasi dana desa membuat masyarakat pasif pada setiap aspek pembangunan di Desa Pilolahunga

5.2 Saran

Berangkat dari kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas, peneliti memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan kedepan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pilolahunga antara lain :

- a. Perlu adanya sinergitas kepentingan antara berbagai elemen masyarakat agar tujuan dan pembangunan desa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan melalui alokasi dana desa
- b. Untuk memperkuat kompetensi aparatur desa, melalui pemerintah desa harus merancang agenda tahunan melalui pelatihan bagi aparat desa baik yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun mengikutsertakan aparat desa pada pelatihan yang dilakukan oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2015). Muh Firyal Akbar. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4(1), 49-52.
- Anshori, Nurani Siti, & Yuwono, C. I. (2013). MAKNA KERJA (Meaning of Work) Suatu study etnogrifi Abdi Dalam Keratin Ngayogyakarta Hadiningrat Daaerah Istimewah Yogyakarta. *Jurnal Psikologi Industri dan Orgaanisasi*, 157-162.
- Arofah, R. (2015). *PENGARUH FASILITAS KANTOR, MOTIVASI KERJA, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG*. Semarang: UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .
- Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 213-225.
- Cahyadi, A. (2016). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Administrsi*, 479 - 494 .
- Gintin, L. (21018). *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo)*. Medan: Universiitas Sumatera Utara.
- Kusmaningtyas, A. (2014). Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 487-506.
- M.Richard, S. (2004). *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2017). Pengaruh Aktivitas Organisasi Terhadap Prestasi Belajar. *Jurnal Organisasi Mahasiswa*, 1-12.
- Marsela, R. (2018). *Skripsi: Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasa (Studi Di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)*. Lampung: Fakultas Syiari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Muhammad, K. (2017). Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 146-157.
- Naufal, M. R. (2018). . *Skripsi: Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Prinsip Good Governance Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang Studi Pada*

Aparatur Desa Di Kecamatan Jombang Dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Malang: Universitas Brawijaya.

- Nesia, D. H. (2019). *Skripsi: Analisis Penerapan Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi Empiris Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.* Lampung: UIN Raden Intan Lampung .
- Paramitha, L. M., Domai, T., & Suwondo. (n.d.). KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA OTONOMI DESA (Studi di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan). *Jurusan Administasi Publik*, 91- 100.
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 110 - 119 .
- Rompas , P., Drs. Tomo HS, MS. , & Munir, MM, I. (2010). *(e-book) Kreasi Mutlak Good governance Suatu Eksoterik Mutlak.* Jakarta: Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia .
- Sedarmayanti. (2006). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.* Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian kombinasi.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D .* Bandung : Alfabeta.
- W.R, A. M. (2017). *Skripsi: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan.* Makasar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wijaja, P. D. (2014). *Otonomi Desa (merupakan otonom yang asli, nulat dan utuh).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persaada.

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
 Permendagri Nomor 113 tahun 2014
 PP No. 72 tahun 2005 tentang desa
 PerBub Bolaang Mongondow Selatan No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana desa
 PermendesPDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Priorotas Penggunaan Dana Desa
 Permendagri No 83 thun 2015 tentang pengangkatan dan pemberian aparatur desa